



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN KINERJA 2024

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	03
Tugas Pokok Fungsi	04
Kegiatan Utama	05
Struktur Organisasi	08
Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah	09
Fasilitasi Pendanaan Non APBN/APBD	16
Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi	21
Penghargaan dan Prestasi	24

PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2021-2026, khususnya di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja. Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) BAPPEDA yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di Bidang Penelitian dan Pengembangan, sehingga dapat mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

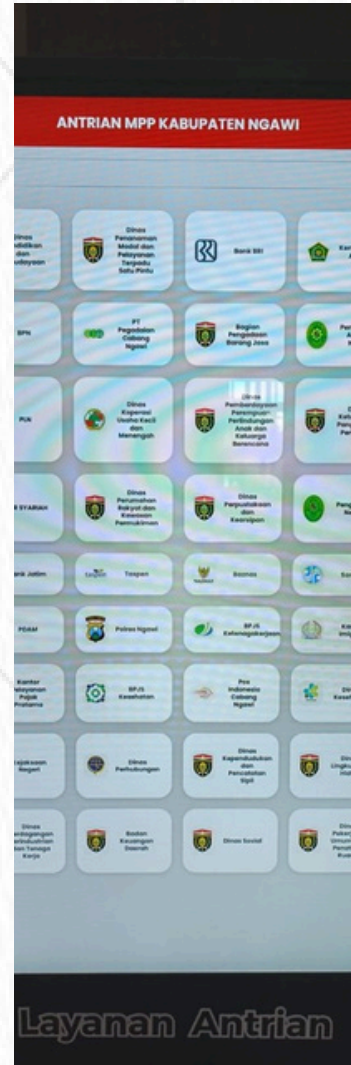
Hormat kami,
02 Januari 2025

NURUL HASANA S.A., S.Pi., MPS., M.Eng
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Riset Inovasi

BERBEDA NGAWI



TUGAS POKOK FUNGSI

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan;
3. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta kerjasama dengan lembaga, dalam rangka penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
4. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
5. pelaksanaan paparan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
6. penyusunan perencanaan program kelitbang serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif;
8. penyusunan program bidang pengembangan dan penguatan inovasi Daerah;
9. pelaksanaan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi dilingkup Pemerintah Daerah;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEGIATAN UTAMA

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan daerah pada Indikator pencapaian indeks perencanaan pembangunan daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai hasil kinerja sebagai berikut :



NILAI DAN BUDAYA INOVASI DAERAH

“Bersama menggerakkan Inovasi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Ngawi Ramah”

KEGIATAN UTAMA

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan daerah pada Indikator pencapaian indeks perencanaan pembangunan daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai hasil kinerja sebagai berikut :



DISEMINASI RISET



PAMERAN INOVASI



SOSIALISASI INOVASI



NILAI DAN BUDAYA INOVASI DAERAH

“Bersama menggerakkan Inovasi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Ngawi Ramah

”

KEGIATAN UTAMA

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan daerah pada Indikator pencapaian indeks perencanaan pembangunan daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai hasil kinerja sebagai berikut :



NILAI DAN BUDAYA INOVASI DAERAH

“Bersama menggerakkan Inovasi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Ngawi Ramah”

STRUKTUR ORGANISASI

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1.Kepala Bidang
- 2.Analis Kebijakan
- 3.Analis Penelitian dan Pengembangan



Nurul Hasana, SA., S.Pi., MPS., M.Eng

KEPALA BIDANG LITBANG



VITA PURNAMASARI SE, MM

ANALIS KEBIJAKAN



ARSITOWATI, A.Md

ANALIS KEBIJAKAN



ESTHI MINDRATI, SE, MSi

ANALIS KEBIJAKAN



LILIK, SH

**ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**



WAHYU TRI HANDONO, SH

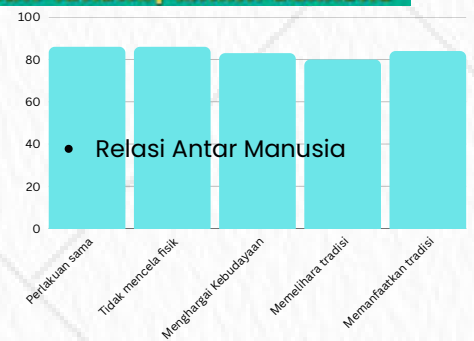
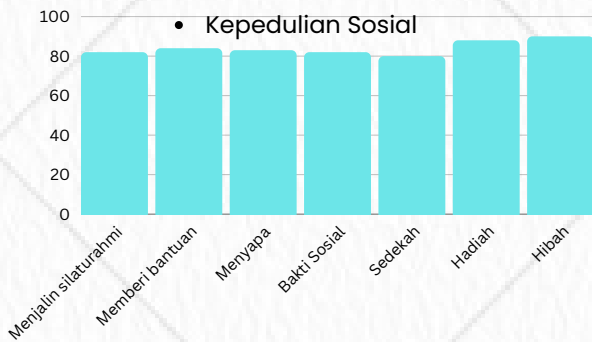
**ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH

BAPPEDA dalam rangka mengevaluasi indikator kinerja bupati, maka bertugas mengukur indeks pembangunan, yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Selain itu, pemenuhan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi pencapaian di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

INDEKS KESHOLEHAN SOSIAL

Pengukuran kesholehan sosial sangat penting dalam pembangunan daerah, karena yang terjadi adalah seringkali nilai-nilai agama hanya berfokus pada ritual ibadah pribadi tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek sosial. Selain itu, perilaku sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama, terutama yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial.



RUANG LINGKUP

Lingkup penelitian pada kajian ini adalah warga Kabupaten Ngawi yang memiliki agama yang diakui oleh negara Indonesia.

Subjek penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah penduduk Kabupaten Ngawi.

Pada penelitian ini patokan jumlah responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah berjumlah 500 orang yang diperoleh dari proporsi masing-masing agama.

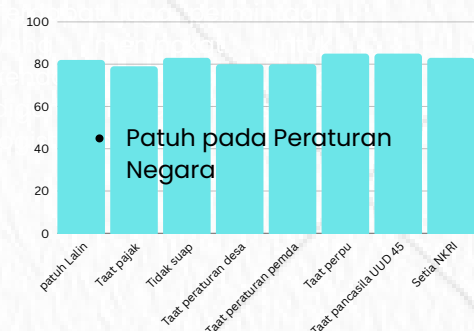
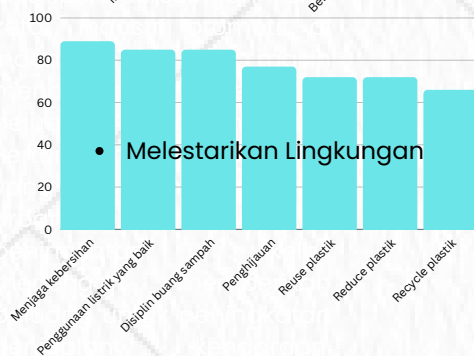
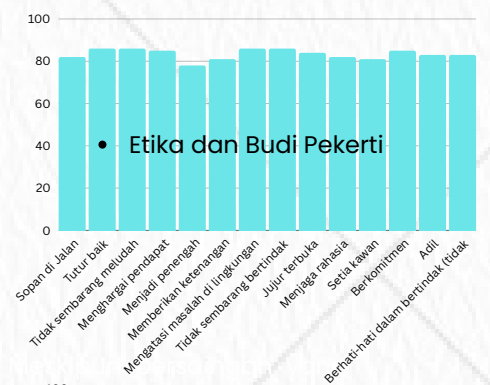


DIMENSI

- Kepedulian Sosial
- Relasi Antar Manusia
- Etika dan Budi Pekerti
- Melestarikan Lingkungan
- Patuh pada Peraturan Negara

METODOLOGI

- Metode pengumpulan data dengan : studi pustaka, observasi, survei, wawancara
- 5 dimensi 46 indikator
- Skala Likert



INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya khususnya dalam melayani masyarakat. Pentingnya penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan karena sesuai dengan tujuannya, kualitas pelayanan yang prima adalah upaya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat.



<p>Faktor: S, W, O dan T</p>	<p>Peluang (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> keadilan masyarakat terhadap manfaat dan tatakelola yang baik atas layanan publik semakin meningkat; partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik meningkat; regulasi dan SOP layanan publik tersedia dan didukung oleh semua pemangku kepentingan; layanan digital sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat; dan komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> terbatas dan daya kritis masyarakat semakin meningkat; pelayanan publik semakin disosialisasikan peningkatan pemanfaatan layanan digital; perubahan budaya masyarakat kearah pelayanan publik daring, cepat, dan mudah; terbatas terhadap manajemen mutu ISO layanan publik; dan terbatas keramahan dan kenyamanan terhadap proses dan dokumen layanan publik.
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah SDM tersedia; sarana dan prasarana tersedia (ruang layanan, ruang tunggu antrian, parkir, toilet, tempat ibadah, dan alat pemadam kebakaran); regulasi dan SOP pelayanan tersedia; data kependudukan tersedia; fasilitas TIK tersedia; dan pelayanan ramah, sopan dan cepat. 	<p>Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> penambahan jumlah SDM dan perbaikan kualitas kompetensi terutama kompetensi digitalisasi layanan; meningkatkan keterampilan dan aksosibilitas layanan digital; meningkatkan kualitas layanan yang lebih ramah, sopan, dan cepat; peningkatan komitmen OPD yang terlibat dalam Mail Pelayanan Publik (MPP) untuk menciptakan layanan publik yang semakin baik (efektif dan berkualitas); dan meningkatkan sosialisasi SOP dan biaya layanan. 	<p>Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> pelatihan kepada SDM terutama pelatihan pelayanan daring; penetapan good governance dalam setiap proses layanan; memberikan respon secara baik, jelas dan cepat terhadap pertanyaan dan kritikan masyarakat; dan meningkatkan keramahan dan kenyamanan proses dan dokumen layanan.
<p>Kerlemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> kualitas SDM perlu ditingkatkan terutama kompetensi berbasis teknologi; SOP dan biaya pelayanan perlu disosiasikan dan informatif; kualitas sarana dan prasarana perlu ditingkatkan termasuk perawatan rutin; penyediaan layanan digital belum maksimal; layanan kepada masyarakat membutuhkan khusus; dan terjangkau tambahan kepala pegawai di layanan publik belum ada. 	<p>Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi; perawatan sarana dan prasarana secara rutin; peningkatan fasilitas layanan digital; menyediakan layanan kepada masyarakat berdasarkan khusus; menyediakan tambahan insentif kepala petugas layanan di MPP; dan peningkatan sinergitas OPD dalam memajukan layanan di MPP. 	<p>Strategi WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> peningkatan jumlah dan kualitas SDM untuk merespon kebutuhan layanan digital dan memuaskan masyarakat; peningkatan sosialisasi SOP dan biaya layanan kepada masyarakat baik di lingkungan MPP maupun melalui media sosial; dan memberikan layanan khusus kepada masyarakat berdasarkan khusus.

DESAIN PENELITIAN

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan melalui survei, sehingga penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Penghitungan IPP juga akan dilakukan dengan indepth interview dan focus group discussion (FGD) yang akan dilakukan kepada dinas-dinas terkait.

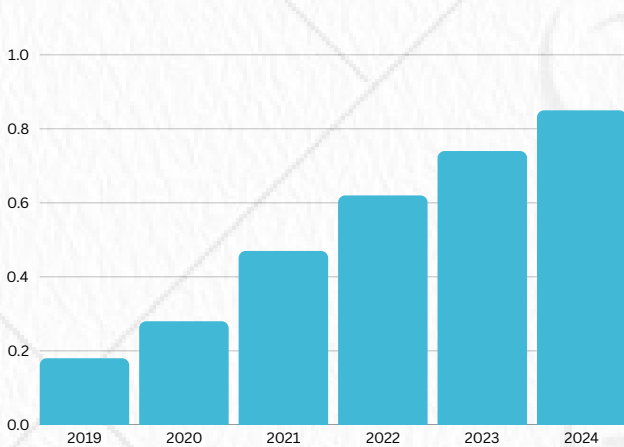
RUANG LINGKUP

Lingkup penelitian pada kajian ini adalah pemberi layanan publik, yaitu Mail Pelayanan Publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UM, Dispendukcapil, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Industri Perdagangan dan TK, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bakesbangpol, SatpolPP, Disparpora dan 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Responden sebanyak 500 orang yang mewakili masyarakat pengguna layanan publik di instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert.

Unsur pelayanan yang dinilai : a. Persyaratan b. Sistem, mekanisme dan prosedur c. Waktu penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan i. Sarana dan Prasarana

INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

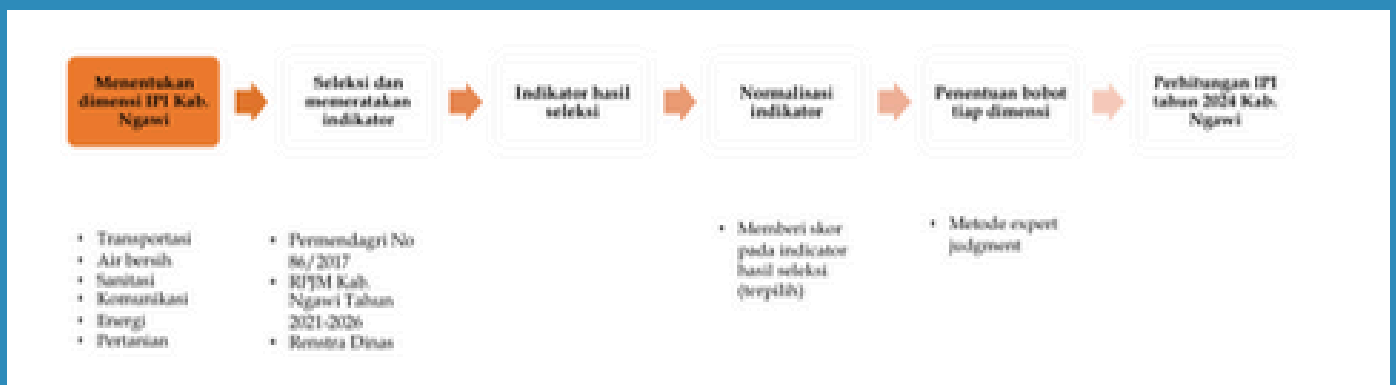
Berdasarkan RPJM Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan publik dalam bidang infrastruktur. Kondisi infrastruktur dapat dilihat melalui indikator jalan mantap, akses kepada sanitasi layak, dan akses kepada air minum layak. Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase kelurahan pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.



Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, yang kemungkinan berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur mengalami kemajuan yang solid dan berkelanjutan.

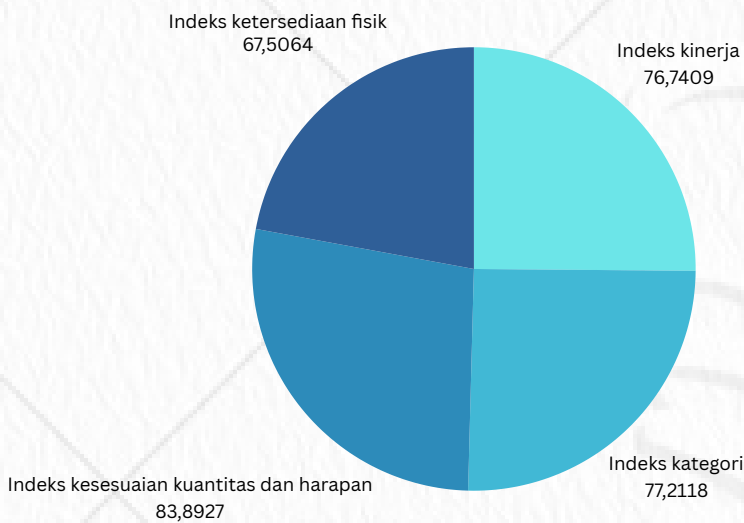
IPI 2024 : 0,85
LAYANAN KATEGORI BAIK

ALUR ANALISIS



INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR

IKLI yang menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan dan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan dan kontribusi terhadap perekonomian.



DESAIN PENELITIAN

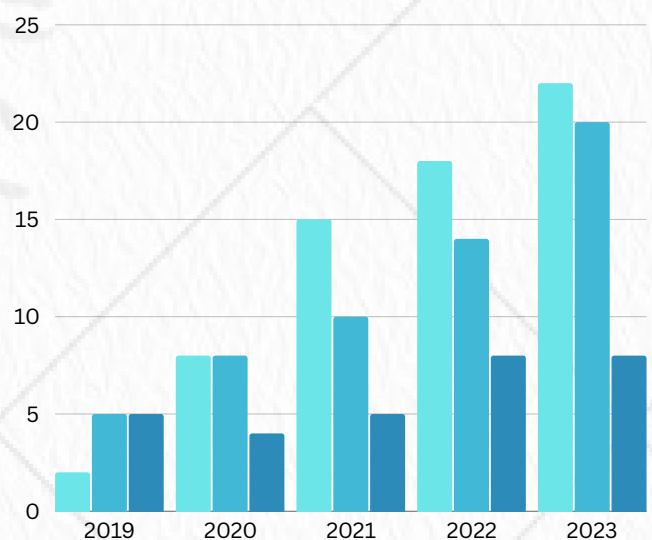
Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian dengan menggunakan fakta dan data yang berasal dari responden kemudian dianalisis sesuai dengan gambaran yang ada di lapangan. Metode yang digunakan :

- Metode kualitatif skala likert
- Metode non probability sampling
- Teknik pengambilan sampel Accidental Sampling
- Responden sebanyak 501

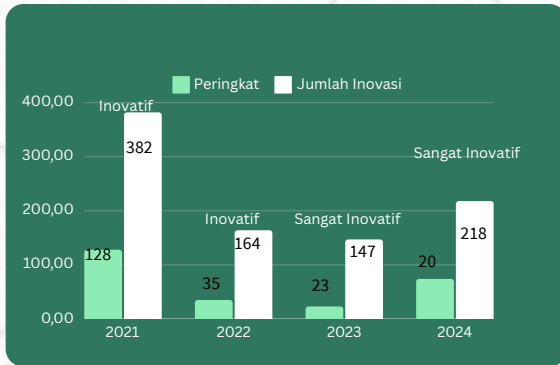
IKLI 2024 : 76.33795



Hasil di atas menunjukkan bahwa terdapat dua infrastruktur yang dinilai sangat penting oleh responden yaitu Kesehatan dan penerangan jalan, hal ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ngawi untuk melakukan kegiatan pengembangan proyek Alat Penerangan Jalan (APJ)



INDEKS INOVASI DAERAH



Bagaimana

- Investasi Teknologi
- Penggunaan Kecerdasan Buatan
- Melibatkan Pendekatan Riset Inovasi

Menjawab Tantangan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Prioritas

Mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong pusat perekonomian baru berbasis pertanian berkelanjutan

Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah dan teknologi informasi

Meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian serta konektivitas pusat-pusat Perekonomian, Layanan Investasi Produk dan Layanan Digital

IID 2024 : 73.98

KATEGORI KABUPATEN SANGAT INOVATIF

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Indeks Inovasi Daerah

- Memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai kebijakan nasional
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap inovasi pemerintah daerah
- Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang inovatif
- Manfaat Indeks Inovasi Daerah

Memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah

- Memberikan penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah
- Mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan

Inovasi Unggulan
**PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
INVERSI MPP (INTEGRATED SERVICE MALL PELAYANAN
PUBLIK)**

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengukuran IPKD oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk :

- Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
- Memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota
- Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.



FASILITASI PENDANAAN NON APBD/APBN

Bappeda Kabupaten Ngawi berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam forum TJSP. Diharapkan, dengan koordinasi yang baik, program TJSP dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan mendapatkan direktif pimpinan untuk memfasilitasi Forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Forum TJSP dipimpin oleh Pimpinan Bank Jatim dengan anggota lebih dari 60 Mitra Pembangunan. Pada tahun 2024, Forum TJSP telah berkiprah nyata untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ngawi, terutama dalam penanganan kemiskinan dan dukungan kesehatan dan pendidikan yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Operasi Kembar Bayi Kembar Siam serta program lainnya (dapat diakses di <https://bappeda.ngawikab.go.id/csr/>).



PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Forum TJSP berkomitmen untuk mendorong pemenuhan Infrastruktur Sosial dalam Penanganan Stunting (Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak layak Huni) di daerah rawan stunting dan atau Rumah Tangga Miskin).

MUSRENBANG TEMATIK TJSP

Musrenbang Tematik TJSP menjadi bukti nyata dari pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kini telah berkembang menjadi forum-forum tematik, memungkinkan terwujudnya kesepakatan yang lebih spesifik dan terukur. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/03/07/pelaksanaan-musrenbang-tjsp-pertama-kali-di-ngawi-membuka-jalan-menuju-pembangunan-berkelanjutan/>



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Regulasi tentang TJSP di Kabupaten Ngawi :

- Peraturan Bupati No 125 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perbup Ngawi No 11 Tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 14 Tahun 2016 tentang TJSP
- SK Bupati No 188/305/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Ngawi
- SK Bupati No 188/304/404.101.2/B/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Forum TJSP Kabupaten Ngawi Masa Bakti 2023-2028



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan mitra utama pelaksana Corporate Social Responsibility (CSR). BAZNAS juga menerima dana CSR/TJSL dari perusahaan untuk disalurkan kepada masyarakat. Mengapa BAZNAS bisa menjadi mitra CSR?

• BAZNAS aktif dalam aksi sosial kemanusiaan

- BAZNAS dapat membantu perusahaan mengemas dana CSR-nya dengan tepat sasaran
- BAZNAS dapat membantu masyarakat yang membutuhkan

LISTRIK GRATIS

PT PLN Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan memberikan bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Ngawi. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan PLN kepada penerima program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/10/23/penyerahan-bantuan-tj-sp-pt-pln-ngawi-sambungan-listrik-gratis-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah/>



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pendanaan non APBN/D melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Tahun 2024 yang dilaporkan sebesar Rp. 2.254.820.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Masih banyak mitra yang belum terakses laporannya karena keterbatasan sistem pelaporan ke Forum TJSP dan Tim Money TJSP Kabupaten Ngawi.



OPERASI KEMBAR SIAM

Bayi kembar siam asal Kabupaten Ngawi, Azizah Syafa dan Azzahrah Syafa, berhasil dipisahkan setelah menjalani serangkaian operasi dan perawatan intensif selama tiga setengah bulan. Rangkaian operasi intensif itu dilakukan oleh tim dokter RSUD dr Soetomo Surabaya. Direktur utama bank Jatim Busrul Iman menyerahkan bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.

UNIT MOBIL DAMKAR

Bentuk peduli masyarakat, Bank Jatim kembali serahkan Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini, Bank Jatim serahkan CSR kepada Kabupaten Ngawi. Satu unit mobil Pemadam Kebakaran wujud dari CSR tersebut diserahkan ke Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono oleh Corporate Secretary Bank Jatim Wioga Adhiarma Aji di pendopo Wedya Graha, bertepatan dengan HUT Kabupaten Ngawi ke- 666.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bentuk Pendanaan Lain oleh Forum TJSP Kabupaten Ngawi :

- Bibit tanaman
- Bantuan pasar murah dan gelar kuliner
- Job fair
- Bakti sosial dan sembako
- Bantuan hari besar keagamaan, HUT 17 dan ziarah
- Rehab jalan - daya tani sembada
- Bantuan Alat kerja
- Bantuan beasiswa pendidikan - jinawi, dwi mitra sentosa



RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI)	1	UNIT
PT. BANK RAKYAT INDONESIA	50	UNIT
PT SURYA BANGAN SENTOSA (SPS)	1	UNIT
PT WIDODO	5	UNIT
PT SINERGI GULA	1	UNIT
RS. AT TINHUSADA	2	UNIT

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Dengan adanya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan secara signifikan. Rumah yang layak huni akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga, serta mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, program RTLH ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Dengan memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan



PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal

FORUM KELITBANGAN

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda / Bappedalitbang dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun. Dengan tagline **“Bergerak dan Maju Bersama,”** forum kelitbangan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mengembangkan inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/07/11/bappeda-ngawi-gelar-rapat-koordinasi-forum-kelitbangan-dan-replikasi-inovasi/>



KOMPETISI INOVASI

Kompetisi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung dan mengapresiasi ide-ide kreatif dari masyarakat yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Para pemenang akan menerima penghargaan dan dukungan untuk mengimplementasikan inovasi mereka dalam skala yang lebih luas. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/07/10/kompetisi-inovasi-kabupaten-ngawi-2024/>



DISEMINASI RISET

Direktur Fasilitas Riset Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lukman Shalahudin, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi atas kontribusi signifikan mereka dalam peringatan Hari Teknologi Nasional dan pendekatan inovatif melalui pentahelix komunitas. Hal tersebut disampaikan oleh Lukman dalam acara Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Ngawi di Luxury Mallioboro Hotel, Ngawi. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/08/14/diseminasi-ri-set-dan-inovasi-daerah-sektor-ekonomi-masyarakat-dan-dunia-pendidikan/>

KARYA TULIS ILMIAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Karya Tulis Ilmiah di Ruang Arjuna, Notosuman, Kabupaten Ngawi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari kedepan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyusun risalah kebijakan (policy brief) berbasis bukti. <https://bappeda.ngawikab.go.id/2024/10/01/bimtek-karya-tulis-ilmiah-2024-untuk-tingkatkan-kualitas-penyusunan-kebijakan/>

Acara ini membahas berbagai aspek penting terkait penulisan KTI, seperti metode penelitian, pengumpulan data yang valid, serta teknik penulisan yang sesuai dengan standar JFAK. Para peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan KTI serta mendapat tips dan trik dari narasumber yang sudah berpengalaman dalam penyusunan karya ilmiah.





PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Dengan bangga menyampaikan penghargaan dan prestasi yang telah diterima sebagai pengakuan atas pencapaian Bappeda Kabupaten Ngawi :



Indeks Inovasi Daerah 2024

Bersama segenap Tim Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi mendapatkan apresiasi sebagai Kabupaten Sangat Inovatif di peringkat 20 tingkat nasional dengan nilai indeks 73,98.



Inotek Award Jawa Timur 2024

Dengan mengusung inovasi PE Gaskan GO mendapatkan apresiasi peringkat IV tingkat provinsi di Kategori Inovasi Berbasis Mobile / Aps.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

JL TEUKU UMAR 12 NGAWI

